

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

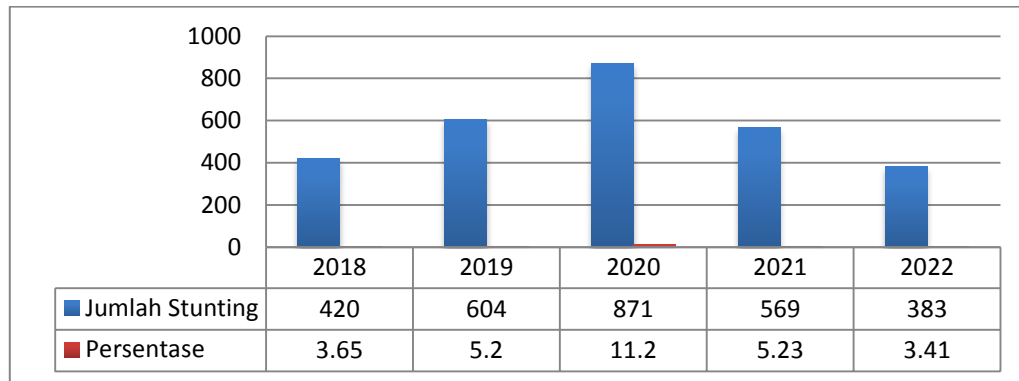
Persoalan *stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi buruk yang masih banyak ditemukan di Indonesia. *Stunting* mengakibatkan minimnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya kemampuan produktivitas suatu bangsa dimasa yang akan datang (Trihono, dkk. 2015). Sejalan dengan itu, permasalahan *stunting* juga memiliki dampak yang serius karena dapat mengakibatkan tidak terwujudnya target pembangunan nasional serta timbulnya resiko beban besar yang nantinya harus ditanggung oleh negara karena kurang berkualitasnya sumber daya manusia (Priyono, 2020).

Pada tahun 2020 prevalensi *stunting* di Indonesia telah mencapai 26,92%, sedangkan pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni menjadi 24,4%. Adapun pada tahun 2022 prevalensi *stunting* kembali mengalami penurunan yakni menjadi 21,6% (<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>). Meskipun prevalensi *stunting* dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan, namun persentase tersebut masih dinilai tinggi mengingat angka tersebut masih jauh dari ambang batas yang telah ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yakni tidak boleh melebihi dari 20%.

Penurunan prevalensi *stunting* saat ini menjadi agenda utama Pemerintah Indonesia. Keseriusan pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Adapun dalam Peraturan Presiden tersebut tercantum target penurunan *stunting* sebesar 14% secara nasional yang harus dicapai pada tahun 2024. Target tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara multisektor oleh seluruh elemen Pemerintah Indonesia dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

Bintan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Merujuk pada data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, pada tahun 2018 jumlah balita *stunting* mencapai 420 kasus dengan prevalensi 3.65%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 604 kasus dengan prevalensi mencapai 5.2%. Di tahun berikutnya, persoalan *stunting* mengalami peningkatan yang cukup drastis yakni mencapai 871 kasus dengan prevalensi 11.2% lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 569 kasus dengan prevalensi 5.23%. Sedangkan pada tahun 2022, angka *stunting* kembali menunjukkan *trend* penurunan yakni menjadi 383 kasus dengan prevalensi 3.41%.

**Gambar 1.1 Jumlah Prevalensi Stunting di Kabupaten Bintan Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, 2022 (telah diolah kembali)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa angka *stunting* mengalami penurunan, namun masih terdapat beberapa desa/kelurahan yang mengalami peningkatan kasus *stunting*. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2022, Di Kecamatan Bintan Timur tepatnya di Kelurahan Gunung Lengkuas mencatat terdapat 31 kasus *stunting* sedangkan di Kelurahan Kijang Kota terdapat 22 kasus *stunting*. Selain itu, di Kecamatan Seri Kuala Lobam tepatnya di Kelurahan Desa Teluk Sasah terdapat 31 kasus *stunting*. Di Kecamatan Seri Kuala Lobam tepatnya di Desa Teluk Sasah, kasus *stunting* cukup tinggi karena sebagian besar orangtua bekerja sehingga anaknya dititipkan kepada orang lain (batampos.co.id, 2023).

Merujuk pada data keseluruhan dari kabupaten angka *stunting* memang menunjukkan *trend* penurunan, namun persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Palsalnya terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari persoalan *stunting*. Anak merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya berpotensi sebagai

tolak ukur kesuksesan suatu daerah. Jika persoalan ini tidak dituntaskan, maka akan berakibat pada terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkualitas bagi pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu, percepatan penurunan *stunting* harus menjadi agenda prioritas bagi daerah khususnya bagi Kabupaten Bintan.

Pemerintah Kabupaten Bintan mulai gencar melakukan berbagai upaya guna percepatan penurunan *stunting*. Adapun salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Bintan untuk mewujudkan amanat nasional terkait penurunan angka *stunting* dibuktikan dengan adanya Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Pada Peraturan Bupati tersebut pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menurunkan prevalensi *stunting* agar terwujudnya generasi muda yang sehat, cerdas, produktif serta berkualitas dan dapat memberikan dampak dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sesuai arahan dari Bupati Bintan bahwa angka *stunting* harus dapat menurun lagi sehingga menjadikan Bintan dapat bebas dari *stunting* (*zero stunting*) (batamnews, 2022). Oleh sebab itu, Kabupaten Bintan terus berupaya untuk menekan angka *stunting* serta mencegah munculnya kasus-kasus *stunting* baru. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bekerjasama untuk mendukung terwujudnya percepatan penurunan *stunting* melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS). Adapun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam TPPS ini terdiri dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kabupaten Bintan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

(DP3KB) Kabupaten Bintan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan serta organisasi kemasyarakatan yakni TP-PKK Kabupaten Bintan.

Penelitian ini menganalisis tentang tata kelola kolaboratif dalam percepatan penurunan *stunting* khususnya di Kabupaten Bintan. Pada dasarnya, upaya dalam percepatan penurunan *stunting* tidak akan mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri saja. Pemerintah daerah membutuhkan pihak-pihak lainnya untuk ikut serta dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini, maka pemerintah diharuskan untuk menerapkan model pemerintahan kolaboratif melalui tata kelola kolaboratif (*Collaborative Governance*).

Pada dasarnya penanganan *stunting* memerlukan koordinasi lintas sektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Latifa, 2018). Pengentasan *stunting* perlu dilakukan secara konvergensi yang berarti melakukan aksi bersama secara terpadu dan saling terhubung antar program baik yang sifatnya fisik pembangunan infrastruktur kesehatan maupun berkenaan dengan program pemberdayaan kesehatan serta edukasi kepada masyarakat (Saufi, 2021). Oleh sebab itu, tata kelola kolaboratif pada penanganan *stunting* dinilai sebagai salah satu jawaban dalam mewujudkan percepatan penurunan *stunting*.

Peneliti tertarik mengambil lokus di Kabupaten Bintan karena Bintan merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta terdiri dari banyak pulau (Kepripost.com, 2023). Meskipun Kabupaten Bintan didominasi oleh

banyak pulau dan aksesibilitasnya yang sulit, namun Bintang secara statistika telah berhasil menekan angka *stunting* dari tahun ketahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintang**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintang ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan proses *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan pada penelitian serta dapat dipecahkan pada rumusan masalah secara tepat dan akurat. Adapun dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian yakni secara teoritis dan praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan serta memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai masalah *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholder* serta menjadi sumbangsih penelitian terhadap *input* bagi para pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bintan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bintan.

